

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan dari hasil dan pembahasan yang telah dijelaskan pada Bab IV mengenai pengaruh kompetensi sumber daya manusia, penerapan sistem pengendalian intern pemerintah, dan *good governance* terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah daerah adalah sebagai berikut:

1. Berdasarkan hasil regresi yang diperoleh, variabel kompetensi sumber daya manusia memiliki nilai signifikansi sebesar 0,00 Hasil analisis regresi ini menunjukkan bahwa kompetensi sumber daya manusia berpengaruh signifikan positif terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah daerah yang memiliki arti bahwa hipotesis pertama (H_{a1}) dari penelitian ini diterima. Hal ini menunjukkan bahwa dengan adanya penerapan kompetensi sumber daya manusia yang memiliki kompetensi kerja meliputi keterampilan, kinerja dan memiliki sikap dalam bekerja. Setiap sumber daya manusia dengan kualitas memiliki pemahaman yang baik akan mampu untuk menghasilkan pekerjaan yang lebih optimal sehingga dapat untuk meningkatkan diterapkannya prinsip-prinsip akuntabilitas kinerja instansi pemerintah daerah
2. Berdasarkan hasil regresi yang diperoleh, variabel penerapan sistem pengendalian intern pemerintah memiliki nilai signifikan 0,02 Hasil analisis regresi ini menunjukkan bahwa sistem pengendalian intern pemerintah

berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah daerah yang memiliki arti bahwa hipotesis kedua (Ha2) pada penelitian ini diterima. Hal ini menunjukkan bahwa dengan diterapkannya sistem pengendalian intern pemerintah maka dapat memberikan kepercayaan bahwa program atau kegiatan aktivitas yang dilaksanakan oleh aparatur pemerintah daerah berjalan sesuai dengan peraturan yang ditetapkan. Dengan adanya sistem pengendalian intern pemerintah yang memadai dalam menyelenggarakan kegiatan pemerintahan maka akan meningkatkan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah daerah.

3. Berdasarkan hasil regresi yang diperoleh, variabel *good governance* memiliki nilai signifikansi sebesar 0,00. Hasil dari analisis regresi ini menunjukkan bahwa *good governance* berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah daerah yang memiliki arti bahwa hipotesis ketiga (Ha3) pada penelitian ini diterima. Hal ini menunjukkan dengan diterapkannya *good governance* maka dapat memberikan pelayanan publik yang lebih baik dan dapat di pertanggung jawabkan kinerjanya kepada masyarakat sehingga dapat meningkatkan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah daerah.

Berdasarkan hasil kesimpulan yang telah diuraikan diatas, penelitian ini telah menunjukkan hasil yang sesuai dengan tujuan penelitian yaitu untuk menguji kembali variabel dari penelitian terdahulu, yaitu pengaruh kompetensi sumber daya manusia, penerapan sistem pengendalian intern pemerintah, dan *good governance* terhadap

akuntabilitas kinerja instansi pemerintah daerah dengan obyek yang berbeda yaitu OPD Pemerintah Daerah Kabupaten Gunungkidul. Berdasarkan hasil dari uji koefisien nilai *adjusted R²* sebesar sebesar 0,738 artinya variabel independen pada penelitian ini mampu menjelaskan variabel dependen sebesar 73,8% dan sisanya dijelaskan oleh variabel lain yang tidak termasuk dalam penelitian ini.

Hasil dari pengujian yang sejalan dengan penelitian ini menunjukkan bahwa variabel yang telah digunakan pada penelitian ini berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah daerah. Terkait masalah dengan penurunan nilai akip yang terdapat di dalam sakip gunung kidul. Penilaian AKIP 2021 Gunungkidul mendapatkan penilaian terendah pada penilaian kabupaten di provinsi Yogyakarta dan mengalami penurunan penilaian dari 2020 yang mendapatkan nilai “BB” menjadi menurun pada 2021 menjadi “B”. faktor penyebabnya adalah Kurang tersedianya informasi tentang implementasi sakip, Kurang nya kompetensi sumber daya manusia yang disebabkan oleh skill yang tidak sesuai dengan bidang pekerjaan. Kurang nya tanggung jawab pimpinan dalam menindaklanjuti setiap evaluasi dan saran yang di berikan oleh BPK atau inspektorat, Kurang nya komunikasi berkelanjutan dalam memberikan tentang akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang efektif antara OPD pengawas internal dengan masyarakat. Oleh karena faktor penyebab ini, untuk mengatasi permasalahan tersebut maka pihak internal dari OPD dan eksternal yaitu masyarakat perlu melakukan koordinasi, menjalin hubungan yang harmonis dan memiliki komunikasi yang baik, serta meningkatkan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah daerah. Proses

pelaksanaan akuntabilitas kinerja pemerintah pada tahun berikutnya diharapkan untuk dapat ditingkatkan, sehingga memiliki dampak bagi masyarakat atas kegiatan dari kinerja yang telah dilakukan oleh pemerintah daerah Kabupaten Gunung Kidul.

5.2. Keterbatasan Penelitian

Berdasarkan kesimpulan diatas, penelitian ini memiliki keterbatasan sebagai berikut:

1. Dalam proses pengumpulan data informasi yang diberikan responden tidak semua menjawab pertanyaan sesuai dengan mewakili pendapat responden yang sebenarnya. Ada beberapa hal kemungkinan kenapa responden tidak menjawab sesuai dengan pendapat responden yaitu mungkin dikarenakan responden tidak memahami pertanyaan dan adanya ketidakjujuran responden dalam menjawab pertanyaan.
2. Penelitian yang dilakukan tidak disertai wawancara secara langsung kepada responden sehingga belum mendapatkan hasil yang mendalam dan belum tentu mencerminkan keadaan yang sebenarnya.

5.3. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan yang diperoleh, maka peneliti mengharapkan penelitian ini bermanfaat sebagai masukan. Maka peneliti memberikan saran sebagai berikut:

1. Diharapkan ketika ingin memberikan kuesioner kepada responden sebaiknya menjelaskan secara detail setiap pertanyaan yang tujuannya agar responden dapat menjawab dan mengerti atas setiap pertanyaan dijawab dengan jujur dan sesuai dengan fakta yang berlaku di kegiatan sesungguhnya.
2. Disarankan kepada peneliti selanjutnya diharapkan mempertimbangkan rencana jadwal penyebaran kuesioner, sebaiknya untuk menghindari penyebaran kuesioner di akhir tahun karena OPD cenderung sibuk menyiapkan laporan akhir tahun.
3. Untuk pemerintah daerah kabupaten gunung kidul, agar dapat meningkatkan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah daerah hendaknya memperhatikan faktor-faktor yang dapat mempengaruhi peningkatannya seperti sumber daya manusia, sistem pengendalian intern dan *good governance*. dan juga penelitian ini diharapkan dapat untuk menjadi sarana dalam meningkatkan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah daerah di kabupaten gunung kidul.

DAFTAR PUSTAKA

- Badan Kepegawaian Negara (BKN). 2003. *Pedoman Penyusunan Standar Kompetensi Jabatan Struktural Pegawai Negeri Sipil*. Jakarta.
- Claraini, C. (2017). “*Pengaruh Good Governance, Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dan Gaya Kepemimpinan Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah (Studi Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Rokan Hilir)*”. Fakultas Ekonomi, Jurnal. JOM Fekon, Volume 4, Nomor 1, Halaman (3110-3123) April 2017. Universitas Riau. Pekanbaru.
- Gunawan, A. dan Nasir, A. (2019). “*Implementasi Good Governance Dan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Untuk Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Studi Kasus Pada Pemerintah Kabupaten Bandung Barat)*”. Jurnal Akuntansi, Politeknik Negeri Bandung, Bandung.
- Ghozali, I. (2018). *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 25*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Halim. (2004). *Akuntansi Sektor Publik*. Jakarta: Salemba Empat.
- Hutapea, P & Thoha, N. (2008). *Kompetensi Plus*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Jensen, M. C., & Meckling, W. H. (1976). *Theory of The Firm: Managerial Behavior, Agency Cost and Ownership Structure*. Journal of Financial Economics, 3(4), 305-360.
- Nadiyah, R. (2019). “*Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia Dan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah Kabupaten Musi Banyuasin*”. Skripsi Politeknik Negeri Sriwijaya, Sumatra selatan.
- Nadila, S. (2020). “*Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran, Sistem Pengendalian Intern, Good Governance dan Kompetensi Sumber Daya*

Manusia Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) (Studi Kasus Pada Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sumatera Selatan)". Skripsi Jurusan Akuntansi, Politeknik Negeri Sriwijaya. Palembang.

Mardiasmo. (2002). *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Andi.

_____. (2009). *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Andi.

Mahmudi. (2016). *Akutanasi Sektor Publik (Edisi Revisi)*. Yogyakarta: UII Press Yogyakarta.

Lembaga Administrasi Negara RI, (2003). *Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah*, Nomor:239/IX/6/8/2013.

LAN dan BPKP. (2000). *Akuntabilitas dan Good Governance*. Jakarta: Lembaga Administrasi Negara.

Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pengawasan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan. (2007). *Akuntabilitas Instansi Pemerintah*. Edisi Kelima. Jakarta.

Republik Indonesia. (1999). Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 Tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

_____. (2000). Peraturan Pemerintah No. 101 tahun 2000 tentang Pendidikan, Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil.

_____. (2000). Permenpan Nomor 12 Tahun 2015 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

_____. (2003). Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

_____. (2008). Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Internal.

_____. (2010). Peraturan Pemerintah No. 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan

_____. (2011). Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Gunungkidul.

_____. (2014). Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

_____. (2014). Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Ketenagakerjaan.

_____. (2014). Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Otonomi Daerah.

_____. (2018). Undang-Undang No. 18 Tahun 2018 tentang Pemerintah Daerah.

Sutirah, E. 2018. *“Pengaruh Good Governance Dan Penerapan SPIP Terhadap Kinerja Pemerintah Desa Di Kabupaten Bantul”*. Skripsi Fakultas Bisnis Dan Ekonomi, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Yogyakarta.

Tambuk, H. H. (2020). *“Pengaruh Penerapan Anggaran Berbasis Kinerja, Sistem Pelaporan Kinerja, Sistem Pengendalian Internal Dan Komitmen Organisasi Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah*

Kabupaten Manggarai Timur". Skripsi Fakultas Bisnis Dan Ekonomi,
Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Yogyakarta

